

DPRD Sukoharjo Imbau
Dinsos Awasi DTSEN

SUKOHARJO (KR) - DPRD Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada Dinas Sosial (Dinsos) melakukan pengawasan dan pendampingan di tingkat desa dan kelurahan terkait peralihan sistem pendataan warga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengawasan dilakukan dalam proses verifikasi dan validasi per satu bulan.

Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto mengatakan pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru pendataan warga miskin melalui perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSEN. Perubahan sistem tersebut harus lebih gencar disosialisasikan oleh Dinsos Sukoharjo ke tingkat bawah, seperti pemerintah desa, pemerintah kelurahan hingga masyarakat. "Hal ini penting, mengingat selama ini sistem yang terbiasa dijalankan yakni DTKS dan sekarang berubah menjadi DTSEN," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinsos Sukoharjo Suparmin mengatakan pihaknya sejak awal sudah melakukan sosialisasi terkait perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSEN. Sasarannya petugas di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Dinsos Sukoharjo juga menyasar masyarakat umum, mengingat perubahan aturan ini sangat penting mereka pahami.

"Perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSEN sebagai langkah besar pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran," tandasnya. Menurutnya, DTSEN tidak hanya mengintegrasikan DTKS tetapi juga menyelaraskan dan memadankan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Regsosek dan P3KE.

Dinsos Sukoharjo juga sudah melakukan pendampingan penuh kepada pemerintah desa dan kelurahan. Prosesnya sama dengan pengawasan saat penerapan DTKS, hanya beda sistem menjadi DTSEN. Dalam pengawasan tersebut, Dinsos Sukoharjo memastikan verifikasi dan validasi data di tingkat desa dan kelurahan sudah berjalan baik.

Seperti imbauan DPRD Sukoharjo, Dinsos melakukan verifikasi dan validasi tiap satu bulan, sekaligus pengawasan dan pendampingan di tingkat desa dan kelurahan. DPRD Sukoharjo secara resmi juga sudah menyampaikan imbauan tersebut melalui rekomendasi berupa Catatan Strategis LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo. **(Mam)-f**

ATASI MARAKNYA TOKO MODERN DI DESA
Koperasi Merah Putih Jadi Solusi

PATI (KR) - Lahirnya Koperasi Merah Putih (MP) yang diprakarsai pemerintah diharapkan menjadi jalan tengah (solusi) adanya silang pendapat keprihatinan masyarakat mengenai menjamurnya toko modern di pelosok pedesaan. Kemunculan Koperasi MP merupakan ikhtiyar desa untuk menjadi pemeran utama dalam program swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Ketua Umum Kepala Desa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Pandoyo mengungkapkan hal itu di Pati, Selasa (25/4). Tokoh yang juga Kades Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan, warga desa dalam posisi sebagai produsen sekaligus konsumen, selama ini hanya mendengar tentang hiruk pikuk tatakelola pasar dan ekonomi tanpa ada solusi un-

tuk mendapat kesempatan memperoleh nilai tambah dari hasil kerjanya.

"Pemerintah pusat, lalu mengambil kebijakan mendirikan koperasi MP mencari solusi dari sekedar omon-omon yang menyual maraknya pasar modern di pelosok pedesaan," tandas Pandoyo. Jika nilai tambah diperoleh masyarakat desa atas hasil karyanya, maka semangat dan produktivitas, serta totalitas akan mengarah pada upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Karena itu, Koperasi MP merupakan bagian dari ikhtiyar untuk mengembalikan nalar ke-Indonesia-an. Hal ini sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas keke-



KR-Alwi Alaydrus

Pandoyo

luargaan. Amanat konstitusi inilah koperasi di Indonesia didirikan.

"Sudah berpuluh tahun koperasi

sebagai saka guru perekonomian nyaris ditinggalkan dan mati suri. Namun saat ini, dengan semangat merah putih koperasi dibangkitkan kembali" tegas Pandoyo.

Menjawab pertanyaan wartawan, Pandoyo mengatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Desa didorong untuk menumbuhkan kembali koperasi sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama.

Disinggung mengenai keberadaan BUMDes, Pandoyo menegaskan bahwa dua lembaga tersebut tidak tarik-menarik atau bertentangan. Hal itu mengingat kolaborasi dan sinergi antara pemdes dan masyarakat adalah kunci dua entitas tersebut. **(Cuk)-f**

SPPG YAYASAN MELATI KARANGANYAR DIRESMIKAN
Dorong Pemenuhan Gizi dan Ekonomi Lokal

KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama jajaran TNI dan lembaga pendidikan menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Melati Santina Utama di Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo, Senin (14/4). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan gizi anak dan mendukung program ke-

sehatan pemerintah secara menyeluruh.

Peresmian dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karanganyar Rober Christanto menyampaikan apresiasi atas berdirinya SPPG sebagai

bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program gizi nasional.

Dengan peresmian SPPG ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terwujud, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. "Kami sangat mengapresiasi pembangunan SPPG ini. Harapannya, dapur ini dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten Karanganyar serta menjadi bagian dari upaya kolektif mendukung program pemerintah," ungkap Rober.

Hal senada disampaikan Komandan Kodim 0727/Karanganyar Letkol Kav Dhanang Prasetyo Kurniawan SH MTr.Opsla. Dandim juga menegaskan kesiapan TNI dalam mendampingi dan mengawal pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut. Letkol TNI Dhanang menekankan bahwa manfaat SPPG tidak hanya dirasakan oleh siswa dan ibu hamil, tetapi juga berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi lokal. "Tak hanya siswa dan ibu hamil sebagai penerima manfaat, namun ekonomi lokal juga

diharapkan turut bergerak," tegasnya.

SPPG Yayasan Melati Santina Utama merupakan unit keempat yang telah beroperasi di Karanganyar dan menjadi yang kedua di wilayah Kecamatan Gondangrejo. Fasilitas ini melayani sekitar 3.404 siswa dari jenjang TK hingga SMA/SMK. Sasaran layanan ditentukan berdasarkan jarak antara dapur dan sekolah, serta kapasitas maksimal pelayanan yang mampu diberikan.

"Program ini merupakan bagian dari target besar pemerintah daerah dalam membangun 73 titik SPPG secara bertahap, guna menjangkau lebih dari 155.000 penerima manfaat di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar," jelas Dandim. Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kepentingan pribadi, terutama dalam penyediaan jasa katering. Masyarakat diminta segera melapor kepada Babinsa atau Koramil setempat jika menemukan indikasi penipuan. **(Lim)-f**



KR-Abdul Alim

Peresmian SPPG di Gondangrejo Karanganyar.

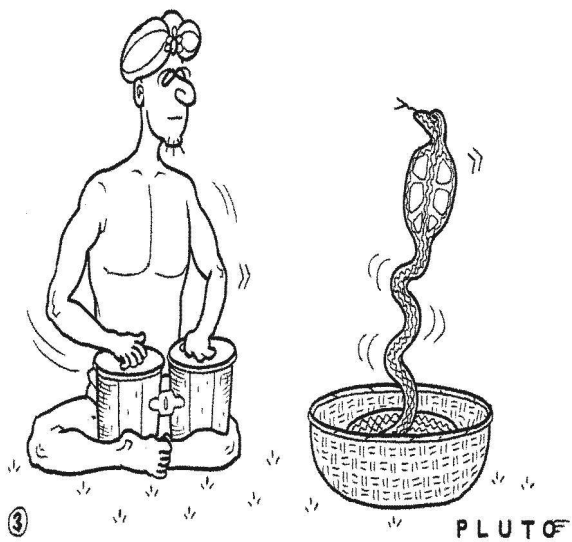
Guyon Maton

Gaji tinggi,
jabatan terhormat,
fasilitas terjamin, kok
masih mau terima
suap.

Sengaja
meremehkan
hukum.



joko santoso



PLUTO